



Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Pantai Tureloto Kabupaten Nias Utara

**Anita Putri Kristina Lase¹, Robert Tua Juni Sitio², Liyus Waruwu³, Elvri Teresia
Simbolon⁴**

¹Mahasiswa, Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Kristen, IAKN Tarutung

^{2,3,4}Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, IAKN Tarutung

*correspondence: laseanita65@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian daya tarik wisata Pantai Tureloto, Kabupaten Nias Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata pesisir berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan dalam menjaga kebersihan, melakukan gotong royong, membantu pemeliharaan fasilitas, memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan, menjaga keamanan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi melalui usaha makanan, minuman, dan jasa wisata. Namun, partisipasi masih dominan pada tingkat operasional dan belum merata, terutama dalam perencanaan, pengelolaan fasilitas, pelestarian budaya, pemanduan, pengembangan atraksi, dan pengambilan keputusan. Kelembagaan yang belum kuat, keterbatasan sarana-prasarana, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, dan ketimpangan distribusi manfaat menjadi hambatan utama. Penelitian menghasilkan *Community Participation–Stewardship Framework* yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, *destination stewardship*, pelestarian lingkungan dan budaya, kualitas pengalaman wisatawan, serta distribusi manfaat lokal. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mentransformasikan masyarakat dari pelaksana aktivitas wisata menjadi *co-manager*, *co-creator*, dan *steward* bagi keberlanjutan Pantai Tureloto.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, Pantai Tureloto, *community-based tourism*, pemberdayaan masyarakat, *destination stewardship*, pariwisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pariwisata pesisir merupakan salah satu sektor yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mendorong pembangunan sosial masyarakat lokal. Namun, peningkatan aktivitas wisata pada kawasan pesisir juga dapat menghasilkan tekanan terhadap lingkungan, perubahan sosial, dan ketimpangan distribusi manfaat apabila pengembangannya tidak dikelola secara berkelanjutan. Karena itu, paradigma pembangunan pariwisata telah bergeser dari orientasi yang semata-mata mengejar pertumbuhan kunjungan menuju pendekatan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, kualitas pengalaman wisatawan, dan partisipasi komunitas lokal (UNEP & UNWTO, 2005). Dalam paradigma tersebut, masyarakat bukan sekadar penerima dampak pariwisata, melainkan aktor yang turut menentukan keberlanjutan destinasi.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena komunitas lokal memiliki kedekatan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya dengan sumber daya wisata. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan partisipasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang substantif tidak cukup diukur dari kehadiran masyarakat dalam aktivitas operasional. Masyarakat juga perlu memiliki ruang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tosun (2000) menunjukkan bahwa pada banyak negara berkembang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata sering kali masih bersifat terbatas dan lebih dominan pada tahap implementasi daripada pengambilan keputusan. Perspektif tersebut menjadi fondasi bagi *community-based tourism* (CBT). Murphy (1985) menempatkan masyarakat sebagai komponen integral dalam pembangunan destinasi, sedangkan Okazaki (2008) menekankan bahwa CBT membutuhkan partisipasi, pemberdayaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya ditandai adanya masyarakat yang berdagang di sekitar destinasi, tetapi juga sejauh mana komunitas mempunyai kapasitas, akses terhadap manfaat, serta pengaruh dalam tata kelola pariwisata. Aspek pemberdayaan menjadi semakin penting dalam hubungan tersebut. Scheyvens (1999) mengemukakan empat dimensi pemberdayaan melalui pariwisata, yaitu ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Sementara itu, Boley dan McGehee (2014) menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam membentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Artinya, masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi belum tentu telah mengalami pemberdayaan apabila mereka tidak memiliki kapasitas dan kesempatan untuk memengaruhi pengelolaan destinasi.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca kondisi Pantai Tureloto di Desa Balefadorotuho, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Pantai ini memiliki karakteristik alam berupa perairan yang relatif tenang, gugusan batu karang, kejernihan air, dan kondisi perairan dengan kadar garam tinggi yang menjadi daya tarik tersendiri. Potensi tersebut sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan. Namun, potensi wisata tidak otomatis menghasilkan pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian menemukan keterbatasan fasilitas seperti toilet, tempat sampah, pondok wisata, dan area parkir, serta persoalan kebersihan dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Temuan awal memperlihatkan bahwa masyarakat lokal telah menjalankan sejumlah fungsi penting. Mereka melakukan pembersihan kawasan

dan gotong royong, membantu pemeliharaan fasilitas, memberikan informasi kepada pengunjung, menjaga keamanan dan kenyamanan, serta memanfaatkan aktivitas pariwisata melalui warung, lapak, makanan, dan berbagai jasa. Dalam perspektif *destination stewardship*, tindakan tersebut penting karena keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah atau pengelola formal, tetapi pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk menjaga sumber daya bersama. Namun demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketimpangan intensitas partisipasi. Masyarakat yang tinggal atau menjalankan usaha di sekitar pantai jauh lebih aktif daripada masyarakat yang berada lebih jauh dari kawasan. Manfaat ekonomi juga lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang berada dekat dengan destinasi. Kondisi tersebut penting karena CBT mensyaratkan bukan sekadar adanya manfaat, tetapi juga kesempatan partisipasi dan distribusi manfaat yang lebih inklusif. Sebagaimana dikemukakan Goodwin dan Santilli (2009), klaim mengenai CBT perlu dinilai berdasarkan manfaat nyata yang diterima komunitas dan kapasitas lokal yang terbentuk.

Persoalan lain adalah partisipasi masyarakat masih lebih kuat pada level operasional daripada tata kelola strategis. Masyarakat aktif dalam kebersihan, pelayanan, keamanan, dan aktivitas ekonomi, tetapi pengelolaan fasilitas umum dan koordinasi kelembagaan belum stabil. Pola tersebut memperlihatkan perbedaan antara *community involvement* dan *community empowerment*. Keterlibatan menunjukkan bahwa masyarakat melakukan aktivitas pariwisata, sedangkan pemberdayaan mensyaratkan kapasitas untuk ikut menentukan arah pengelolaannya. Selain itu, pelestarian masih dominan pada dimensi lingkungan. Masyarakat melakukan pembersihan, gotong royong, pengawasan informal, serta teguran terhadap perilaku membuang sampah. Sebaliknya, keterlibatan dalam pelestarian budaya, pemanduan, interpretasi destinasi, dan pengembangan atraksi lokal masih terbatas. Padahal, pariwisata berkelanjutan membutuhkan integrasi antara konservasi sumber daya, pengalaman wisata, identitas lokal, dan kesejahteraan komunitas (Bramwell & Lane, 2011).

Kajian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pariwisata telah berkembang luas, antara lain melalui konsep partisipasi (Cohen & Uphoff, 1980), batas partisipasi dalam pembangunan pariwisata (Tosun, 2000), CBT (Okazaki, 2008), pemberdayaan masyarakat (Scheyvens, 1999), dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan destinasi (Boley & McGehee, 2014). Akan tetapi, naskah penelitian ini menunjukkan ruang kajian yang lebih spesifik, yaitu menghubungkan secara simultan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian destinasi pesisir, dengan melibatkan perspektif pemerintah desa, pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian Pantai Tureloto serta mengidentifikasi keterbatasan yang menghambat transformasi keterlibatan masyarakat menuju partisipasi yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kebaruan artikel diarahkan pada kerangka *Community Participation – Stewardship Framework*. Kerangka ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pelaku ekonomi atau tenaga pendukung destinasi, tetapi sebagai *co-manager* dan *co-creator of destination value*, sehingga keberlanjutan Pantai Tureloto dibangun melalui keterpaduan antara partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, kelembagaan, dan distribusi manfaat pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian daya tarik wisata Pantai Tureloto. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada bentuk keterlibatan, pengalaman, tindakan, serta hubungan antarpemangku kepentingan dalam konteks alamiah destinasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual partisipasi masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2018; Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Pantai Tureloto, Desa Balefadorotuhu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Pantai Tureloto sebagai daya tarik wisata alam yang melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi pariwisata. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap aktivitas pariwisata Pantai Tureloto. Informan meliputi pemerintah desa, pengelola objek wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, dan wisatawan. Pelibatan kelompok informan yang berbeda dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai bentuk partisipasi, distribusi manfaat, pengelolaan fasilitas, pelayanan wisatawan, pelestarian lingkungan, serta hambatan pengelolaan destinasi. Observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan pantai, kebersihan, fasilitas wisata, aktivitas masyarakat, pelayanan wisatawan, usaha ekonomi, dan praktik pemeliharaan kawasan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan manfaat pariwisata, pengawasan, pelestarian, serta hubungan antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi hasil observasi dan wawancara. Temuan diinterpretasikan menggunakan perspektif *community participation*, *community-based tourism*, *empowerment*, dan *destination stewardship* untuk memahami transformasi keterlibatan masyarakat dari aktivitas operasional menuju pengelolaan dan pelestarian destinasi yang lebih terorganisasi, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah mengambil peran nyata dalam pengelolaan Pantai Tureloto, terutama melalui pemeliharaan kebersihan lingkungan, dukungan terhadap fasilitas, pelayanan wisatawan, keamanan, dan kegiatan ekonomi wisata. Namun demikian, partisipasi tersebut belum berlangsung secara merata dan terorganisasi. Masyarakat yang tinggal atau memiliki usaha di sekitar kawasan pantai menunjukkan keterlibatan lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang bermukim lebih jauh. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat Pantai Tureloto masih dominan pada bentuk *direct and operational participation*. Jika menggunakan kerangka Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi ideal mencakup pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi. Pada Pantai Tureloto, keterlibatan terlihat lebih kuat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan manfaat, sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan fasilitas publik, dan evaluasi belum tampak sama kuatnya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam naskah, yang menemukan bahwa keterlibatan dalam pengelolaan fasilitas umum dan koordinasi kelembagaan masih belum stabil. Temuan ini relevan dengan Tosun (2000), yang

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di negara berkembang sering lebih kuat pada level implementasi daripada proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, persoalan Pantai Tureloto bukan ketiadaan partisipasi, melainkan kedalaman dan pemerataan partisipasi.

Masyarakat sebagai Penjaga Kebersihan dan Lingkungan

Kebersihan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang paling terlihat. Masyarakat melakukan pembersihan kawasan, bergotong royong menjaga lingkungan, serta mengingatkan pihak yang membuang sampah sembarangan. Pengawasan lingkungan juga berlangsung secara informal melalui masyarakat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan pantai. Temuan ini menunjukkan munculnya bentuk awal *destination stewardship*, yaitu kesediaan komunitas untuk mengambil tanggung jawab terhadap sumber daya yang menopang aktivitas pariwisata. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau pengelola formal. Komunitas lokal mempunyai posisi strategis karena berinteraksi secara terus-menerus dengan destinasi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa kesadaran terhadap kebersihan belum merata. Masih terdapat masyarakat maupun pengunjung yang kurang memperhatikan kebersihan sehingga tindakan individual dan gotong royong belum cukup untuk menjamin konsistensi pelestarian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa *community awareness* perlu ditransformasikan menjadi *community-based environmental governance*. Artinya, kepedulian spontan perlu didukung sistem pengelolaan sampah, aturan kebersihan, pembagian tanggung jawab, fasilitas tempat sampah, dan pengawasan yang jelas.

Partisipasi dalam Pengelolaan Fasilitas: Ada Keterlibatan, tetapi Belum Terorganisasi

Masyarakat juga berpartisipasi dalam pemeliharaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan aktivitas mereka. Namun, penelitian menemukan bahwa tidak seluruh fasilitas umum dikelola melalui kelompok masyarakat dan sebagian aktivitas masih dilakukan secara individual. Pembagian tanggung jawab antara masyarakat, pengelola, pemerintah desa, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah pengelolaan Pantai Tureloto bukan hanya persoalan ketersediaan fasilitas, melainkan juga *institutional arrangement*. Toilet, tempat sampah, pondok wisata, dan area parkir membutuhkan pengelolaan berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan fisik. Naskah memang mengidentifikasi fasilitas-fasilitas tersebut sebagai aspek yang masih membutuhkan perhatian. Dalam kerangka *community-based tourism*, Okazaki (2008) menekankan bahwa partisipasi masyarakat perlu didukung kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Tanpa struktur kelembagaan, keterlibatan cenderung bersifat personal dan situasional. Kondisi Pantai Tureloto memperlihatkan kebutuhan untuk bergerak dari *individual involvement* menuju *organized community participation*.

Masyarakat sebagai Co-Creator Pengalaman Wisata

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi masyarakat tidak terbatas pada aspek fisik destinasi. Masyarakat sekitar pantai memberikan informasi kepada wisatawan, membantu kebutuhan pengunjung, menjaga keamanan, serta menciptakan suasana ramah dan nyaman. Temuan tersebut penting karena pengalaman destinasi tidak hanya dihasilkan oleh panorama pantai dan fasilitas, tetapi juga melalui interaksi *host-guest*.

Keramahan, rasa aman, kemudahan memperoleh informasi, dan interaksi sosial menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Dengan demikian, masyarakat dapat dipahami sebagai *co-creator of destination experience*. Hal tersebut memperluas pemahaman mengenai peran masyarakat. Komunitas lokal bukan hanya penerima manfaat ekonomi dan penjaga lingkungan, tetapi ikut menghasilkan kualitas produk wisata. Naskah penelitian secara eksplisit menemukan bahwa keramahan dan bantuan masyarakat menjadi bagian dari pengalaman pengunjung Pantai Tureloto. Implikasinya, peningkatan kualitas destinasi perlu mencakup pengembangan kapasitas masyarakat dalam *hospitality*, komunikasi wisata, pelayanan dasar, keselamatan, dan pemberian informasi destinasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memberikan manfaat tanpa harus melakukan pembangunan fisik berlebihan.

Manfaat Ekonomi dan Persoalan Pemerataan

Aktivitas pariwisata telah menciptakan peluang ekonomi melalui lapak, warung, penjualan makanan dan minuman, serta berbagai jasa wisata. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara aktivitas wisata dan ekonomi lokal. Dalam perspektif pemberdayaan, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk *economic empowerment*. Scheyvens (1999) menjelaskan bahwa pariwisata dapat memberdayakan masyarakat apabila menghasilkan manfaat ekonomi dan kesempatan yang dapat diakses komunitas lokal. Namun, penelitian menemukan bahwa manfaat tersebut belum terdistribusi secara merata. Peluang ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang tinggal atau menjalankan usaha di sekitar pantai, sementara masyarakat yang berada lebih jauh belum banyak terlibat karena aktivitas wisata belum menjadi kegiatan yang rutin dan terstruktur bagi mereka. Temuan ini menunjukkan perbedaan antara *economic participation* dan *inclusive economic empowerment*. Kehadiran usaha masyarakat belum otomatis menunjukkan pemerataan manfaat. Keberlanjutan CBT membutuhkan perluasan rantai nilai agar kelompok masyarakat lain dapat terlibat, misalnya melalui penyediaan kuliner, produk lokal, kerajinan, transportasi, jasa pemanduan, kegiatan budaya, dan produk kreatif. Semakin luas masyarakat memperoleh manfaat yang wajar dari pariwisata, semakin besar pula peluang terbentuknya kepentingan bersama untuk mempertahankan kualitas destinasi.

Pelestarian Masih Dominan pada Dimensi Lingkungan

Temuan penting lainnya adalah adanya ketidakseimbangan dalam bentuk pelestarian. Masyarakat relatif aktif dalam menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan pengawasan informal, tetapi keterlibatan dalam pelestarian budaya, pemanduan, dan pengembangan atraksi masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengertian pelestarian di Pantai Tureloto masih dominan sebagai *environmental preservation*. Padahal, keberlanjutan destinasi juga dapat mencakup dimensi sosial dan budaya (Bramwell & Lane, 2011). Jika masyarakat memiliki cerita lokal, tradisi, kuliner, pengetahuan mengenai kawasan, atau ekspresi budaya yang berkaitan dengan identitas Nias, unsur tersebut berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari interpretasi destinasi. Namun, naskah penelitian ini belum memberikan data empiris rinci mengenai bentuk budaya tertentu yang dapat dijadikan atraksi, sehingga artikel tidak seharusnya menginventarisasi atraksi budaya yang tidak ditemukan dalam data. Yang dapat ditegaskan berdasarkan hasil penelitian adalah kebutuhan meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam pemanduan, interpretasi daya tarik, pengembangan atraksi lokal, dan pengelolaan aktivitas wisata, sebagaimana direkomendasikan langsung dalam temuan penelitian.

Dari Community Involvement Menuju Community Empowerment

Sintesis temuan memperlihatkan perbedaan penting antara keterlibatan dan pemberdayaan. Pantai Tureloto telah memiliki *community involvement*: masyarakat membersihkan kawasan, melayani wisatawan, menjaga keamanan, memelihara fasilitas tertentu, dan menjalankan usaha. Namun, *community empowerment* membutuhkan tingkatan yang lebih tinggi berupa kapasitas, kelembagaan, ruang pengambilan keputusan, akses terhadap manfaat, serta kemampuan memengaruhi arah pembangunan destinasi. Scheyvens (1999) membedakan pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologis, dan politik. Boley dan McGehee (2014) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan variabel penting dalam bagaimana masyarakat merespons pembangunan pariwisata. Dalam konteks Pantai Tureloto, temuan mengenai lemahnya kelembagaan, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, dan ketidakmerataan partisipasi menunjukkan bahwa penguatan pemberdayaan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga *organizational and decision-making capacity*.

Perbedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kondisi Saat Ini	Arah Penguatan
Gotong royong situasional	Program pelestarian terorganisasi
Usaha wisata individual	Rantai ekonomi komunitas
Pengawasan informal	Tata kelola lingkungan kolaboratif
Pelayanan berdasarkan inisiatif	Pelatihan hospitality dan pemanduan
Manfaat terkonsentrasi di sekitar pantai	Pemerataan kesempatan partisipasi
Keterlibatan operasional	Keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi
Koordinasi belum stabil	Kelembagaan multipihak yang jelas

Transformasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang membantu pengelolaan, tetapi memiliki posisi substantif dalam tata kelola destinasi.

Hasil penelitian mengidentifikasi kelembagaan yang belum kuat, pembagian tanggung jawab yang belum jelas, keterbatasan sarana-prasarana, dan partisipasi yang belum merata sebagai hambatan pengembangan. Dengan demikian, persoalan kunci Pantai Tureloto tidak semata terletak pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Sebagian masyarakat sudah menunjukkan kemauan tersebut. Persoalannya adalah bagaimana partisipasi individual tersebut diorganisasikan menjadi kapasitas kolektif. Okazaki (2008) menempatkan partisipasi dan pemberdayaan sebagai komponen penting CBT. Sementara Tosun (2000) mengingatkan adanya hambatan struktural dan operasional yang dapat membatasi partisipasi komunitas. Temuan Pantai Tureloto memperlihatkan kebutuhan untuk membangun mekanisme yang mempertemukan pemerintah desa, pengelola, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan Dinas Pariwisata secara lebih

konsisten. Kebutuhan penguatan kerja sama tersebut juga merupakan kesimpulan langsung penelitian. Dengan demikian, keberlanjutan membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas, kebersihan, keamanan, promosi, pembinaan usaha, pemanduan, dan pelestarian.

Community Participation-Stewardship Framework

Berdasarkan keseluruhan temuan, artikel ini mengembangkan *Community Participation-Stewardship Framework*. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi saja belum cukup. Partisipasi perlu dikonversi menjadi kapasitas kelembagaan sehingga masyarakat mampu terlibat secara terorganisasi. Kelembagaan yang kuat kemudian memungkinkan terbentuknya *destination stewardship*, yaitu tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan, fasilitas, keamanan, pelayanan, dan sumber daya destinasi. Pelestarian yang efektif meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, sedangkan kegiatan wisata menghasilkan manfaat yang perlu didistribusikan secara lebih inklusif kepada komunitas. Kontribusi utama penelitian bukan sekadar membuktikan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam pariwisata Pantai Tureloto, tetapi menunjukkan bahwa keberlanjutan ditentukan oleh kualitas, pemerataan, dan pelestarian peran tersebut. Pantai Tureloto telah memiliki modal sosial berupa kepedulian terhadap kebersihan, keramahan, aktivitas ekonomi, dan pengawasan informal. Tantangan berikutnya adalah mengubah modal tersebut menjadi *collective destination governance*. Dengan penguatan kelembagaan, pembinaan kapasitas, pemerataan kesempatan ekonomi, perluasan peran dalam pemanduan dan pelestarian, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan, masyarakat lokal dapat berkembang dari sekadar peserta aktivitas wisata menjadi *co-manager*, *co-creator*, dan *steward* bagi keberlanjutan Pantai Tureloto.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat lokal memiliki peran nyata dalam pengelolaan dan pelestarian daya tarik wisata Pantai Tureloto, Kabupaten Nias Utara, tetapi tingkat partisipasinya belum merata dan belum sepenuhnya terorganisasi. Peran masyarakat paling terlihat melalui kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong, membantu pemeliharaan fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas mereka, memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan, menjaga keamanan dan kenyamanan, serta menjalankan kegiatan ekonomi melalui lapak, warung, penjualan makanan dan minuman, dan jasa wisata. Temuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat pariwisata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan kualitas pengalaman wisatawan. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara keterlibatan operasional dan partisipasi substantif. Masyarakat yang tinggal atau menjalankan usaha di sekitar pantai memiliki keterlibatan lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berada lebih jauh dari kawasan. Partisipasi juga lebih dominan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan manfaat ekonomi, sedangkan keterlibatan dalam pengelolaan fasilitas umum, koordinasi kelembagaan, perencanaan, dan pengembangan destinasi belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aktivitas masyarakat belum dengan sendirinya mencerminkan *community empowerment* yang kuat.

Pada aspek pelestarian, kontribusi masyarakat terutama diwujudkan melalui kebersihan lingkungan, pengawasan informal, keamanan, dan pemeliharaan kenyamanan kawasan.

Sebaliknya, keterlibatan dalam pelestarian budaya, pemanduan, interpretasi daya tarik, dan pengembangan atraksi wisata masih terbatas. Oleh karena itu, pelestarian Pantai Tureloto perlu dikembangkan dari aktivitas lingkungan yang bersifat praktis menuju pengelolaan destinasi yang lebih komprehensif. Hambatan berupa keterbatasan sarana-prasarana, kesadaran yang belum merata, kelembagaan yang belum kuat, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, dan ketimpangan partisipasi perlu ditangani secara kolaboratif.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menghasilkan *Community Participatio-Stewardship Framework*. Kerangka tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu ditransformasikan dari situational participation menuju organized participation, community empowerment, dan destination stewardship. Dengan demikian, strategi keberlanjutan Pantai Tureloto perlu memprioritaskan penguatan kelembagaan masyarakat, pemerataan ruang partisipasi, peningkatan kapasitas pelayanan dan pemanduan, kejelasan pembagian tanggung jawab, perbaikan fasilitas, perluasan kesempatan ekonomi, serta kolaborasi pemerintah desa, pengelola, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan Dinas Pariwisata. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat dapat berkembang dari sekadar pelaksana aktivitas wisata menjadi *co-manager*, *co-creator*, dan *steward* yang berperan dalam menjaga Pantai Tureloto sebagai destinasi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boley, B. B., & McGehee, N. G. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS). *Tourism Management*, 45, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.04.003>
- Boley, B. B., McGehee, N. G., Perdue, R. R., & Long, P. (2014). Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a Weberian lens. *Annals of Tourism Research*, 49, 33–50. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.08.005>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* (ICRT Occasional Paper No. 11). International Centre for Responsible Tourism.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- United Nations Environment Programme, & World Tourism Organization. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. World Tourism Organization.